

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Zulaili<sup>1</sup>, Porkas Sojuangon Lubis<sup>2</sup>, Riny Viri Insy Sinaga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan,  
[zulaili123zu@gmail.com](mailto:zulaili123zu@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah Medan,  
[porkas.mm@gmail.com](mailto:porkas.mm@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Washliyah  
Medan, [riny30vinsi@gmail.com](mailto:riny30vinsi@gmail.com)

*ABSTRACT*

*This study aimed to analyze the effect of Regional Generated Revenues (PAD) and General Allocation Fund (DAU) to Capital Expenditure (BM) and their impact on Regional Gross Domestic Product (PDRB) in 33 districts/towns of North Sumatera Province. The data used are secondary data obtained from the Central Statistical Agency (BPS) and the site of Directorate General of Fiscal Balance ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) of North Sumatera Province for the period of 2010 to 2015. The data were analyzed by using path analysis. The result of the research showed that simultaneously Regional Generated Revenues, General Allocation Fund and Capital Expenditure had impact on economic growth.*

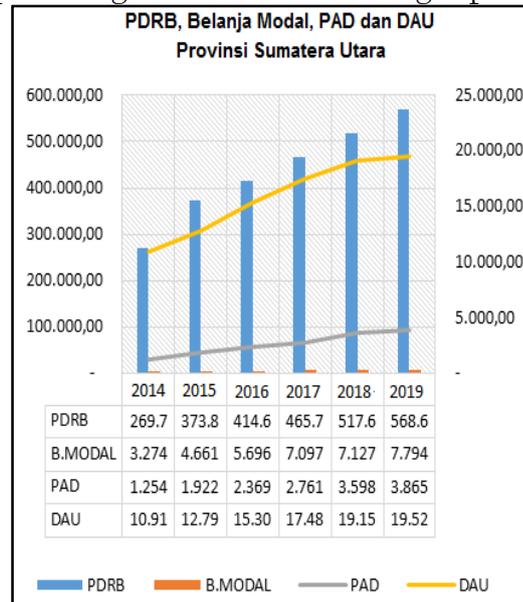
**Keywords:** *Economic Growth, General Allocation Fund, Regional Generated Revenues, Capital Expenditure.*

**PENDAHULUAN**

Peraturan daerah yang sering kita sebut dengan perda, sangat penting bagi pencapaian kebijakan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) dan (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), telah memberikan peluang kepada daerah untuk meningkatkan potensi daerah dan meningkatkan kinerja keuangan guna mewujudkan kemandirian daerah. Asas otonomi daerah menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah berwenang menyelenggarakan dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maryati dan Endarwati, 2010).

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2012), yaitu tindakan pemerintah untuk menciptakan perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pendapatan Nasional dan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten (Bratakusumah dan

Solihin, 2001). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. PDRB, Belanja Modal, PAD dan DAU Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1 tersebut menjelaskan bahwa mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. PDRB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya meningkat, demikian juga dengan realisasi Belanja Modal yang juga meningkat setiap tahunnya. Total realisasi PAD di Provinsi Sumatera Utara jauh lebih kecil dibandingkan dengan Total Realisasi DAU.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Februari 2016 saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden yang dihadiri Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan maupun jalan tol dan bandara merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. . Kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei serta beberapa kawasan industri lainnya yang disiapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Ketersediaan infrastruktur transportasi akan berdampak besar pada kecepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah ekonomi terkait ([www.lintasmedan.com](http://www.lintasmedan.com)).

Peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro dan smith, 2015). Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya peran pemerintah menarik untuk dikaji lebih dalam. Salah satunya penelitian (Mawarni, Darwanis dan Abdullah, 2013) yang menunjukkan bahwa secara simultan hasil pengujian koefisien jalur ditemukan bahwa secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Secara parsial belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Sehingga perlu dikaji pengaruh penerimaan dan alokasi belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORI

Dalam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pasal 79 tentang Pemerintahan Daerah) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Begitu juga yang tertera pada (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan), menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan paling sedikit 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dalam Perdirjen Perbendaharaan no. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan AKUN Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sesuai dengan BAS., Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lain yang meningkatkan masa pakai, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
3. Akuisisi properti, pabrik dan peralatan dimaksudkan untuk tidak dijual.

Menurut (Sukirno,2012), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang terus menerus. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam periode tertentu, laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun.

Hasil (Valadkhani, 1998) yang dilakukan di Iran, ditemukan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Sedangkan menurut (Kuncoro, 2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian (Rumanti, 2009) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Hasil penelitian (Sihite, 2009) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian (Isa, 2010) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

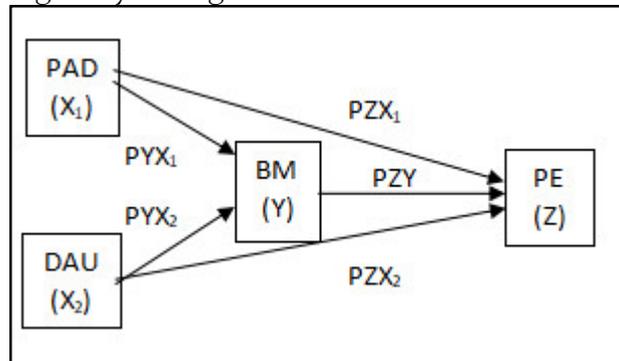
## Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> :PAD dan DAU secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- H<sub>2</sub> :PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- H<sub>3</sub> :DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- H<sub>4</sub> :PAD, DAU dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- H<sub>5</sub> :PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- H<sub>6</sub> :DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- H<sub>7</sub> :Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### Desain penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka rancangan penelitian dapat digambarkan dan dibuat persamaan regresinya sebagai berikut:



Gambar. 2 Desain penelitian

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis jalur variabel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan realisasi APBD berupa data PAD, DAU, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis). Hipotesis diuji dengan metode regresi linier berganda dengan perluasan analisis jalur. Analisis jalur dapat dilihat dari uji beta koefisien standar dan uji koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis ada dua model penelitian, yaitu: Untuk menguji hipotesis 1, 2 dan 3 menggunakan persamaan berikut:

$$Y = PYX1 X1 + PYX2 X2 + \rho Y \epsilon_1 \quad (1)$$

Untuk menguji hipotesis 4, 5, 6 dan 7 digunakan persamaan berikut:

$$Z = PZX1 X1 + PZX2 X2 + PZYY + \rho Z \epsilon_2 \quad (2)$$

Keterangan :

- Z = Pertumbuhan Ekonomi
- Y = Belanja Modal
- X1 = PAD
- X2 = DAU
- P = Koefisien Regresi
- $\epsilon_1$  = Variabel lain yang mempengaruhi Y
- $\epsilon_2$  = Variabel lain yang mempengaruhi Z.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis), setelah semua asumsi klasik di uji dan ditemukan model yang dapat digunakan.

a. Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel. 1 Uji F untuk Persamaan 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2565948.269	2	1282974.134	304.622	.000 <sup>b</sup>
Residual	821279.339	19	4211.689		
Total	3387227.608	21			

a. Dependent Variable: B.MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Hasil pengolahan data pada tabel 1 diperoleh nilai F hitung sebesar 304.622 dan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  yang berarti secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima

Tabel. 2 Uji F untuk Persamaan 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	100786594.005	3	335955313.35	1175.857	.000 <sup>b</sup>
Residual	554279186.562	19	28571092.091		
Total	106329385.871	22			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), B.MODAL, DAU, PAD

Hasil pengolahan data pada tabel 2 diperoleh nilai F hitung sebesar 1175.857 dan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  yang berarti secara simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima.

b. Pengujian Parsial (uji t)

Tabel 3. Pengujian Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.034	11.264		4.886	.000
PAD	.354	.030	.549	11.664	.000

DAU	.208	.024	.404	8.590	.000
-----	------	------	------	-------	------

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai beta koefisien standar untuk variabel PAD adalah 0,549 dengan nilai sig. 0,000 < a (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

a. **Dependent Variable: B.MODAL**

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah mampu mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk membiayai belanja modal daerahnya. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. Nilai standar koefisien beta variabel DAU adalah 0,404 dengan nilai sig. 0,000 sehingga dapat disimpulkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Artinya semakin besar dana transfer yang diberikan ke daerah maka belanja modal di daerah akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima.

**Tabel 4. Koefisien Determinasi untuk Persamaan 1**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 <sub>a</sub>	.758	.755	64.89753

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.MODAL

Tabel 4 menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,755. Artinya variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU sebesar 75,5% sedangkan sisanya 24,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai  $e_1$  dapat dihitung dengan  $e_1 = \sqrt{(1-0.758)} = 0.492$ .

**Tabel 5. Uji t untuk Persamaan 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	5588.417	982.864		5.686	.000
PAD	86.525	3.260	.756	26.539	.000
DAU	20.455	2.343	.224	8.732	.000
B.MODAL	10.993	5.898	.062	1.864	.064

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai beta koefisien standar untuk variabel PAD adalah 0,756 dengan nilai sig.  $0,000 < \alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan peran sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, pasar, rumah sakit dan sarana prasarana lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis 5 diterima.

Nilai beta koefisien standar untuk variabel DAU adalah 0,224 dengan nilai sig.  $0,000 < \alpha$  (0,05). Hal ini dikarenakan DAU yang diterima daerah digunakan untuk kegiatan yang bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 6 diterima.

Nilai beta koefisien terstandarisasi untuk variabel Capital Expenditure adalah 0,062 dengan nilai sig.  $0,064 > \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013) bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 7 ditolak.

Tabel 6. Koefisien Determinasi untuk Persamaan 2

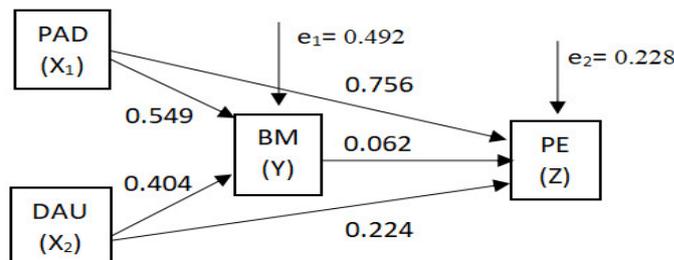
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.974 <sub>a</sub>	.948	.947	5345.193 36
---	-------------------	------	------	----------------

- a. Predictors: (Constant), B.MODAL, DAU, PAD
- b. Dependent Variable: PDRB

Tabel 6 menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,947. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan belanja modal sebesar 94,7% sedangkan sisanya 5,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai e2 dapat dihitung dengan  $e_2 = \sqrt{(1-0.948)} = 0.228$ .

**Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung**



**Gambar 3. Struktur Output**

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung PAD melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,549 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,034. Total pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,583. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi lebih besar daripada pengaruh tidak langsung PAD melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Besarnya pengaruh langsung DAU melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,403 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,247. Total pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,650. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung DAU melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi lebih besar daripada pengaruh langsung DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak langsung melalui Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Utara. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Hasil uji koefisien jalur menunjukkan bahwa DAU tidak langsung melalui Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengaruh langsung PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi lebih besar daripada pengaruh tidak langsung PAD melalui Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara :

- a. Lebih giat lagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengintensifkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), karena kenaikan PAD secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengutamakan alokasi DAU dan belanja modal pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum, seperti prasarana atau sarana yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat peraturan atau regulasi yang dapat dikaitkan dengan penganggaran belanja modal yang bersumber dari migas dan otonomi khusus.
- d. Bagi kabupaten/kota agar membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah agar sinkron dengan kebijakan penggunaan dana migas dan otonomi khusus di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara

2. Bagi peneliti yang tertarik dengan bidang ini, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu yang lebih lama dan menambahkan variabel lain, seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusuma, Sholikin, (2001), *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Isa, Filzah Mar'i., 2010, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara", Medan: FE USU.
- Kuncoro, M., 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Ekonomi, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maryati,Ulfi dan Enderwati (2010), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat", *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.5, No.2, Desember 2010, hlm 68-84.
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013), *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)*", *Jurnal Pascasarjana Akuntansi Syiah Universitas Kuala*, Vol.2, No.2, Mei 2013, hlm 80-90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Rumanti, Indah Ari., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bantuan Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa dan Bali", Yogyakarta: fakultas Ekonomi UMY.

Sadono, Sukirno. (2012). Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: King Grafindo Persada

Sihite, Friska., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", Medan: FE USU.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Todaro, Michael P. dan Smith Stephen C. (2015). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erland

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Valadkhani, A., 1998. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap PDB dalam Ekonomi Iran Menggunakan Pengujian Superexogeneity, Surat Ekonomi Terapan. Nomor 5. Hal: 361-364.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

[www.lintasmedan.com](http://www.lintasmedan.com).